

Efektivitas Sistem Ekonomi Campuran dalam Menangani Krisis: Studi Komparatif Indonesia dan India pada Era Pandemi

Melli Diah Ayu Shaliha¹, Farah Revani Nazarina², Fauziah Fitrianti³, Cut Misni Mulasiwi⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman

* Corresponding Author: melli.shaliha@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak: Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang kompleks terhadap perekonomian global, mendorong pemerintah di berbagai negara untuk merumuskan kebijakan yang adaptif dan responsif. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana sistem ekonomi campuran mampu merespons krisis dengan membandingkan pendekatan Indonesia dan India. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis kebijakan fiskal, moneter, program perlindungan sosial, serta dukungan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) selama masa pandemi. Data dikumpulkan dari laporan resmi pemerintah, organisasi internasional, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengedepankan respons cepat dengan intervensi langsung, seperti bantuan sosial dan program pemulihan ekonomi nasional yang berdampak pada peningkatan pendapatan serta daya beli masyarakat. Sementara itu, India menekankan reformasi struktural jangka panjang melalui inisiatif Atmanirbhar Bharat yang berfokus pada penguatan industri domestik dan peningkatan daya saing. Meskipun kedua negara menerapkan sistem ekonomi campuran, efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur digital, kualitas birokrasi, dan kapasitas kelembagaan. Studi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan sistem ekonomi campuran dalam mengatasi krisis ditentukan oleh sinergi antara intervensi pemerintah dan mekanisme pasar, serta kemampuan negara dalam menyesuaikan kebijakan secara kontekstual dan terkoordinasi.

Kata Kunci: Sistem Ekonomi Campuran, Krisis Pandemi Indonesia India, Kebijakan Ekonomi, Stabilitas Makroekonomi, Resiliensi Fiskal.

The Effectiveness of Mixed Economic Systems in Dealing with Crisis: A Comparative Study of Indonesia and India in the Pandemic Era

Abstract: The COVID-19 pandemic has had a complex impact on the global economy, prompting governments in various countries to formulate adaptive and responsive policies. This study aims to evaluate the extent to which a mixed economic system is able to respond to the crisis by comparing the approaches of Indonesia and India. Through a qualitative descriptive approach, this study analyzes fiscal, monetary policies, social protection programs, and support for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) during the pandemic. Data were collected from official government reports, international organizations, and academic literature. The results of the study show that Indonesia prioritizes a rapid response with direct interventions, such as social assistance and national economic recovery programs that have an impact on increasing people's income and purchasing power. Meanwhile, India emphasizes long-term structural reforms through the Atmanirbhar Bharat initiative which focuses on strengthening domestic industry and increasing competitiveness. Although both countries implement a mixed economic system, the effectiveness of policies is largely determined by the readiness of digital infrastructure, the quality of bureaucracy, and institutional capacity. This study concludes that the success of a mixed economic system in overcoming the crisis is determined by the synergy between government intervention and market mechanisms, as well as the country's ability to adjust policies contextually and in a coordinated manner.

Keywords: Mixed Economic System, Indonesia India Pandemic Crisis, Economic Policy, Macroeconomic Stability, Fiscal Resilience

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 menjadi ujian besar bagi banyak negara dalam mengelola ekonomi di tengah tekanan krisis global. Tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, pandemi juga mengguncang stabilitas sosial dan perekonomian, memaksa pemerintah untuk merespons secara cepat dan tepat. Dalam situasi seperti ini, sistem ekonomi yang digunakan oleh suatu negara memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan dan efektivitas penanganan krisis. Salah satu Sistem ekonomi yang banyak diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia dan India, adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ini menggabungkan elemen-elemen dari ekonomi pasar dan intervensi pemerintah. Artinya negara tidak sepenuhnya menyerahkan perekonomian kepada mekanisme pasar, tetapi juga turut serta dalam mengatur, mengawasi, dan memberikan stimulus bila diperlukan. Pada masa pandemi, kombinasi antara kekuatan pasar dan peran aktif pemerintah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mencegah krisis yang lebih dalam.

Indonesia dan India merupakan dua negara berkembang dengan populasi besar dan struktur ekonomi yang kompleks. Keduanya menerapkan pendekatan sistem ekonomi campuran dalam merespons pandemi, meskipun dengan strategi dan kebijakan yang berbeda. Pandemi Covid-19 memicu kontraksi ekonomi yang luas di kedua negara tersebut. Keduanya mengalami disrupsi besar pada sektor produksi, distribusi, tenaga kerja, dan konsumsi rumah tangga. Di Indonesia pandemi memicu pelemahan ekonomi yang ditandai oleh penurunan pertumbuhan, pelemahan nilai tukar rupiah, ketidakstabilan sektor industri dan jasa. Pandemi juga menyebabkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) turun hingga -5,32% pada kuartal kedua tahun 2020 dan tingkat pengangguran meningkat menjadi 7,07% (Sukamdi et al., 2024). Indonesia merespons krisis ini melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencakup berbagai instrumen fiskal seperti subsidi, bantuan sosial, insentif pajak, dukungan bagi UMKM dan sektor kesehatan (Marginingsih, 2021). Strategi ini sejalan dengan karakter sistem ekonomi campuran, dimana peran pemerintah diperkuat untuk menstabilkan perekonomian nasional dalam situasi darurat.

Namun demikian, implementasi strategi ini tidak selalu berjalan mulus, sektor yang sangat bergantung pada interaksi fisik seperti pariwisata perdagangan mengalami kontraksi paling dalam dan memperlemah kontribusi ekonomi daerah yang berbasis jasa. UMKM sebagai sektor penopang utama ekonomi rakyat juga mengalami penurunan tajam dalam aktivitas produksi dan pemasaran. Banyak diantaranya tidak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap digitalisasi atau akses terhadap pembiayaan, walaupun stimulus fiskal telah disediakan. Selain itu tercatat juga bahwa pasarmodal Indonesia mengalami volatilitas tinggi pada masa awal pandemi yang mencerminkan ketidakpastian ekonomi secara luas.

Situasi di India tidak jauh berbeda, bahkan dalam beberapa aspek lebih kompleks. Negara tersebut mengalami kontraksi PDB sebesar -23,9% pada kuartal pertama tahun fiskal 2020-2021, yang merupakan salah satu penurunan ekonomi terdalam dalam sejarahnya. Pemerintah India merespons melalui paket kebijakan "Atmanirbhar Bharat Abhiyan" senilai sekitar 10% dari PDB yang menekankan pada peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, pemberian kredit bagi UMKM, dan bantuan langsung tunai kepada masyarakat rentan. Meski kebijakan ini cukup ambisius, efektivitasnya dipertanyakan karena sebagian stimulus tidak segera terserap oleh sektor riil, serta tantangan dalam sistem distribusi dan birokrasi yang berbelit (Baber et al., 2024). Dampak ekonomi dari pandemi di India bervariasi pada setiap gelombang. Gelombang pertama menyebabkan pengangguran dan penurunan aktivitas ekonomi, gelombang kedua menimbulkan tekanan inflasi dan fluktuasi pasar saham, sedangkan gelombang ketiga menunjukkan pemulihan yang lebih stabil. Temuan ini menunjukkan pentingnya kelenturan kebijakan ekonomi dan ketepatan dalam alokasi intervensi, yang menjadi karakter khas dari sistem ekonomi campuran. Namun, tantangan struktural seperti dominasi sektor informal, ketimpangan digital, dan lemahnya daya serap fiskal membuat pemulihan ekonomi berjalan lebih lambat dan tidak merata (Baber et al., 2024).

Studi komparatif antara Indonesia dan India dalam konteks sistem ekonomi campuran selama pandemi menjadi penting karena masing-masing negara menawarkan pendekatan berbeda dengan konteks sosial ekonomi yang relatif serupa. Di satu sisi, Indonesia cenderung mengedepankan bantuan sosial dan digitalisasi UMKM, sementara India menitik beratkan pada kemandirian industri domestik. Keduanya bertumpu pada campur tangan negara dalam pasar, namun perbedaan arah kebijakan dan kelembagaan dapat mempengaruhi hasil akhir dalam mengelola krisis.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem ekonomi campuran dalam menangani krisis pandemi Covid-19 melalui studi komparatif antara Indonesia dan India. Fokus analisis

diarahkan pada kebijakan fiskal, stimulus ekonomi dan respon ekonomi. Dengan membandingkan keberhasilan dan tantangan yang dihadapi Indonesia dan India, diharapkan kajian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap literatur kebijakan ekonomi publik, serta memberikan wawasan ilmiah dan praktis dalam penguatan kebijakan ekonomi campuran sebagai kerangka kerja untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dalam menghadapi krisis global di masa depan.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana sistem ekonomi campuran dimanfaatkan dalam menghadapi krisis multidimensional yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 di Indonesia dan India. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi komparatif, fokus penelitian diarahkan pada analisis kebijakan ekonomi kedua negara dalam merespons tekanan ekonomi selama pandemi. Aspek-aspek yang ditinjau meliputi bentuk intervensi pemerintah, kekuatan kelembagaan, tingkat perlindungan sosial, serta strategi

Untuk pendekatan kualitatif, seperti penelitian tindakan kelas, etnografi, fenomenologi, atau studi kasus, harus disertakan informasi mengenai peran peneliti, subjek penelitian, dan informan yang terlibat dalam proses pengumpulan data. Penjabaran juga mencakup lokasi serta durasi penelitian, metode pengumpulan data, dan prosedur untuk memverifikasi keabsahan temuan. Bagian ini disajikan tanpa pembagian ke dalam subjudul yang lebih kecil. penguatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pemilihan Indonesia dan India dilandasi oleh kesamaan keduanya sebagai negara berkembang berpenduduk besar yang menganut sistem ekonomi campuran. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam pendekatan kebijakan dan struktur institusional. Tujuan utama penelitian ini adalah menilai sejauh mana sistem ekonomi campuran dapat berjalan efektif dalam situasi krisis, serta memahami dinamika kerja sama antara peran negara dan mekanisme pasar dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari berbagai publikasi nasional dan internasional yang kredibel. Dokumen utama meliputi kebijakan dan laporan resmi pemerintah seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, dan BPS untuk Indonesia, serta NITI Aayog, Kementerian Keuangan India, dan Reserve Bank of India (RBI) untuk India. Selain itu, referensi dari jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang relevan turut dijadikan sumber data pelengkap. Pemilihan dokumen difokuskan pada periode 2020 hingga 2025 untuk memastikan keterkaitan dengan masa krisis dan pemulihan pasca-pandemi.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi, yakni dengan mengidentifikasi isu-isu utama dalam kenijakan ekonomi masing-masing negara. Tema analisis difokuskan pada lima aspek: kebijakan fiskal dan moneter, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, dukungan terhadap UMKM dan sektor informal, peran kelembagaan dalam sinergi kebijakan, serta indikator kinerja makroekonomi pasca-pandemi. Setiap kenijakan dianalisis dari sisi bentuk intervensi negara, tujuannya, dan pengaruhnya terhadap stabilitas ekonomi. Intervensi diklasifikasikan ke dalam dua kategori sesuai kerangka sistem ekonomi campuran, yaitu intervensi langsung seperti bansos dan subsidi, serta intervensi tidak langsung seperti stimulus fiskal dan deregulasi

Untuk memastikan validitas data dan menghindari bias, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai lembaga dan publikasi yang berbeda. Misalnya, informasi dari laporan pemerintah Indonesia dikonfirmasi melalui publikasi IMP dan World Bank, sementara kebijakan India diuji ulang menggunakan data RBI dan laporan resmi NITI Aayog. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas sistem ekonomi campuran dalam merespons krisis global, sekaligus mengidentifikasi keunggulan maupun keterbatasan masing-masing model kebijakan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran, yang mengintegrasikan peran aktif pemerintah dan mekanisme pasar, telah membuktikan fleksibilitasnya sebagai kerangka yang efektif dalam menghadapi krisis global yang bersifat kompleks dan dinamis, terutama selama pandemi COVID-19. Di Indonesia, sistem ini dijalankan berdasarkan asas ekonomi Pancasila, yang menempatkan negara sebagai pengatur utama dalam sektor-sektor vital seperti energi, ketahanan pangan, dan infrastruktur sekaligus memberikan ruang bagi perkembangan sektor swasta dan koperasi. Pemerintah juga memainkan peran penting dalam menciptakan keseimbangan sosial melalui pemberdayaan UMKM serta kebijakan redistribusi yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Implementasi konkret dari pendekatan ini tampak pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang dirancang sebagai langkah komprehensif untuk merespons tekanan ekonomi akibat pandemi. Selain itu, peningkatan akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) turut dilakukan guna memastikan kelangsungan operasional usaha kecil yang rentan, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi dari tingkat paling dasar. Dengan demikian, prinsip solidaritas dan keadilan yang menjadi fondasi sistem ekonomi campuran berperan signifikan dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global yang luar biasa.

Sebagai respons terhadap tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19, Perdana menteri Narendra Modi memperkenalkan inisiatif *Atmanirbhar Bharat* (India Mandiri) pada Mei 2020. Meskipun berlandaskan pada semangat kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional, inisiatif ini tidak bersifat proteksionis, melainkan bertujuan untuk memperkuat kapasitas domestik agar mampu bersaing secara global. Strategi ini mencerminkan komitmen pemerintah India untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, daya saing, dan ketangguhan terhadap krisis. Fokus utamanya mencakup pembangunan rantai pasok lokal, peningkatan partisipasi India dalam perdagangan internasional dan rantai nilai global, serta pembatalan intervensi negara secara terukur seperti dukungan infrastruktur dan insentif industri, tanpa menutup peluang terhadap investasi asing. Paket stimulus *Atmanirbhar Bharat* diluncurkan dalam tiga tahap, mencakup dukungan terhadap program vaksinasi, pengembangan infrastruktur, reformasi sektor usaha kecil dan menengah (MSME), penguatan industri pertahanan dan peningkatan investasi asing. Reformasi kunci lainnya mencakup liberalisasi kebijakan investasi langsung asing (FDI) di sektor-sektor strategis serta redefinisi klasifikasi MSME untuk memperluas cakupan program bantuan. Seluruh rencana ini berakar pada lima pilar utama: Penguatan ekonomi, infrastruktur, sistem regulasi, model demografi dan permintaan domestik. Dengan demikian, *Atmanirbhar Bharat* mencerminkan karakteristik sistem ekonomi campuran, yang mengkombinasikan peran aktif negara dalam pembangunan nasional dengan keterbukaan terhadap pasar dan modal global, untuk membentuk struktur ekonomi yang inklusif, tangguh dan adaptif.

Krisis Ekonomi Indonesia Dan India pada Masa Pandemi

Krisis ekonomi yang dipicu pandemi Covid-19 adalah penurunan besar dalam Produk Domestik Bruto (PDB), kenaikan pengangguran dan melemahnya konsumsi yang semuanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat sebagai respon atas penutupan ekonomi secara global. Mereka menekankan bahwa krisis ini tidak hanya merupakan resesi biasa, tetapi akibat gabungan tekanan pasokan (supply shock) dan permintaan lemah (demand shock) yang saling memperparah dampaknya, berbeda dari krisis keuangan yang lebih berkaitan dengan lembaga keuangan (Kalamen et al., 2023).

Pandemi covid berdampak sangat berat pada sektor UMKM di Indonesia, melambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pengangguran. Krisis ini memicu pelemahan pertumbuhan PDB yang tercatat hanya sebesar 2,97% pada kuartal pertama tahun 2020, turun drastis dari 5,02% pada kuartal sebelumnya. Penurunan ini menggambarkan kelambatan aktivitas ekonomi nasional sebagai imbas dari berbagai kebijakan pembatasan sosial seperti PSBB dan pembatalan aktivitas ekonomi di sektor perdagangan, industri, dan transportasi. Salah satu indikator paling nyata dari krisis ini adalah peningkatan jumlah pengangguran. Data dari Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa lebih dari 1,5 juta orang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan. Pekerja yang terdampak tidak hanya berasal dari sektor formal, tetapi juga dari sektor informal yang menjadi tulang punggung tenaga kerja Indonesia, dengan sekitar 56,7% dari total angkatan kerja beroperasi dalam sektor ini.

Pandemi Covid-19 juga memberikan dampak serius terhadap seluruh sektor ekonomi di India. Lockdown Nasional diberlakukan pada maret 2020 untuk menekankan penyebaran virus justru memicu gangguan besar pada aktivitas ekonomi. Sektor-sektor utama seperti manufaktur, jasa, pertanian, ritel dan ketenagakerjaan informal sangat terdampak. Yang paling memprihatinkan adalah dampak pada

sektor ketenagakerjaan informal yang mencakup lebih dari 80% tenaga kerja India, pekerja harian, pedangang kecil, dan buruh migran mengalami kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, tanpa jaminan sosial maupun akses yang memadai terhadap bantuan pemerintah. Arus balik pekerja migran ke desa-desa tidak hanya menunjukkan kerapuhan struktur ketenagakerjaan di India tetapi juga membebani infrastruktur pedesaan yang minim (Shandilya, 2024). Ditengah tekanan tersebut teknologi e-commerce tumbuh pesat, didorong oleh lonjakan kebutuhan akan layanan digital belanja daring selama pembatasan sosial. Perusahaan yang telah berinvestasi dalam infrastruktur digital mampu bertahan lebih baik dan bahkan mengalami pertumbuhan. Hal ini mendorong percepatan transformasi digital di sektor pendidikan, kesehatan, dan perdagangan.

Kebijakan Ekonomi

Pemerintah India merespon dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 dengan menerapkan berbagai kebijakan ekonomi yang menyeluruh. Salah satu inisiatif utama adalah peluncuran program Atmanirbhar Bharat Abhiyan (India Mandiri), yakni paket stimulus ekonomi senilai INR 20 lakh crore, setara dengan sekitar 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Inisiatif ini bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi melalui reformasi struktural yang mencakup sektor pertanian, industri manufaktur, serta ketenagakerjaan. Program ini berfokus pada lima pilar utama, yaitu ekonomi, infrastruktur, sistem, demokrasi, dan permintaan domestik.

Sebagai langkah protektif terhadap kemungkinan akuisisi perusahaan domestik oleh investor asing, khususnya dari negara tetangga seperti Tiongkok, pemerintah merevisi kebijakan investasi asing langsung. Di sisi kebijakan moneter, Reserve Bank of India (RBI) turut berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan menurunkan suku bunga acuan seperti repo rate, reverse repo rate, serta legal reserve ratio (LRR), guna meningkatkan kapasitas pinjaman dan permintaan agregat. RBI juga melakukan operasi pasar terbuka, termasuk membeli obligasi pemerintah senilai INR 30.000 crore untuk memperluas basis uang beredar dan mendukung aktivitas perbankan. Fleksibel tambahan juga diberikan kepada sektor keuangan untuk menyesuaikan diri dengan tantangan yang muncul selama masa pandemi.

Lebih lanjut, India memanfaatkan situasi krisis global sebagai peluang untuk menjadi pusat produksi alternatif global menggantikan dominasi Tiongkok. Melalui pendekatan China Plus One, pemerintah menyediakan insentif serta kawasan industri untuk menarik investor asing yang ingin mendiversifikasi rantai pasok mereka. Meski berbagai langkah telah diambil, tantangan fiskal tetap signifikan. Peningkatan belanja untuk sektor kesehatan dan bantuan sosial menyebabkan lonjakan defisit fiskal, sementara penerimaan pajak mengalami penurunan tajam. Hingga pertengahan tahun 2020, defisit fiskal gabungan antara pemerintah pusat dan negara bagian mencapai sekitar 6,5 persen dari PDB. Secara keseluruhan, kebijakan yang ditempuh mencerminkan upaya pemerintah India dalam menyeimbangkan kebutuhan stabilisasi jangka pendek dan reformasi struktural jangka panjang.

Di Indonesia, pemerintah juga menempuh kebijakan ekonomi strategis dalam menanggapi berbagai dampak pandemi, khususnya di sektor kesehatan, sosial dan ekonomi. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 menjadi dasar perubahan prioritas anggaran dengan penekanan pada penguatan sektor kesehatan dan penyediaan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak. Pemerintah juga memberikan insentif perpajakan kepada dunia usaha melalui pembebasan dan penundaan PPh serta percepatan restitusi PPN.

Melalui Perppu No. 1 Tahun 2020, pemerintah memungkinkan pelebaran defisit anggaran melebihi 3% dari PDB hingga tahun 2022 sebagai respons terhadap tekanan fiskal. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) disusun untuk mempercepat pemulihan melalui berbagai bentuk bantuan, termasuk subsidi bunga untuk UMKM, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta dukungan terhadap sektor usaha.

Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, menerapkan kebijakan ekspansif dengan menurunkan suku bunga acuan dan memperkuat koordinasi pembiayaan fiskal melalui pembelian SBN di pasar perdana. Untuk mendorong konsumsi dan memperluas akses keuangan, digitalisasi sistem pembayaran dipercepat. Selain itu, Bank Indonesia memperkuat stabilisasi nilai tukar dan instrumen lindung nilai, serta berkomitmen pada pembangunan ekonomi inklusif dan hijau melalui penguatan UMKM, akses pembiayaan masyarakat berpenghasilan rendah, dan kolaborasi internasional. Seluruh kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat fondasi ketahanan ekonomi nasional dan mendukung pemulihan jangka panjang pasca pandemi.

Stabilitas Makroekonomi

Pasca pandemi, India mengimplementasikan kebijakan moneter dan fiskal secara terkoordinasi

untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Bank Sentral India (RBI) merespons penurunan inflasi ritel yang signifikan-tercatat sebesar 2,82 persen pada Mei-dengan menurunkan suku bunga repo sebesar 50 basis poin menjadi 5,50 persen, serta memangkas Cash Reserve Ratio (CRR) sebanyak 100 basis poin guna meningkatkan likuiditas pada 6 Juni 2025. Langkah ini mencerminkan pergeseran pendekatan dari kebijakan akomodatif menuju netral, yang berfokus pada upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pengendalian inflasi. RBI juga mengindikasikan akan menahan penurunan suku bunga lebih lanjut, menyesuaikan dengan dinamika ekonomi terkini.

Proyeksi menunjukkan bahwa PDB India berpotensi tumbuh sekitar 7,4 persen pada kuartal pertama 2025 dan 6,5 persen untuk keseluruhan tahun fiskal 2024-2025. Kualitas sektor perbankan juga membaik, ditandai dengan penurunan rasio kredit bermasalah (GNPA) menjadi 2,8 persen pada Maret 2024. Meski demikian, lemahnya konsumsi rumah tangga serta ketergantungan terhadap impor energi masih menjadi hambatan. Gejolak geopolitik, seperti konflik Iran-Israel, telah memicu kenaikan harga minyak, yang berisiko menekan inflasi dan nilai tukar rupee. Walaupun begitu, ketahanan ekonomi India didukung oleh cadangan devisa yang memadai, defisit fiskal dan neraca transaksi berjalan yang terkendali, serta upaya penurunan utang sektor korporasi. Dengan demikian, India mampu mempertahankan stabilitas makroekonomi melalui kombinasi inflasi rendah, pertumbuhan yang solid, sistem keuangan yang kuat, dan fondasi ekonomi yang sehat, meskipun tetap harus waspada terhadap risiko eksternal.

Sementara itu, kondisi makroekonomi Indonesia menunjukkan arah pemulihan yang positif setelah melewati tekanan pandemi COVID-19, meskipun masih dibayangi oleh tantangan struktural dan eksternal. Pemulihan terlihat dari pertumbuhan PDB yang meningkat setelah kontraksi pada 2020, yakni sebesar 3,69 persen pada 2021 dan naik menjadi 5,31 persen di tahun 2022. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh meningkatnya konsumsi domestik serta ekspor. Tingkat pengangguran terbuka pun menurun dari 7,07 persen (Agustus 2020) menjadi 5,86 persen (Agustus 2022). Namun, minimnya lapangan kerja di sektor formal menyebabkan pergeseran tenaga kerja ke sektor informal yang cenderung lebih rentan terhadap risiko ekonomi, mencerminkan ketimpangan dalam pemulihan ketenagakerjaan.

Di sisi harga, inflasi Indonesia relatif stabil meski mendapat tekanan dari krisis energi global. Inflasi pada 2022 tercatat sebesar 5,51 persen, dipicu oleh kenaikan harga bahan pangan, energi, dan penyesuaian harga barang yang diatur pemerintah. Ketidakpastian nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turut memperparah kondisi inflasi domestik. Sebagai respons, Bank Indonesia awalnya menjaga suku bunga acuan tetap rendah untuk mendorong pemulihan, lalu secara bertahap menaikkannya pada 2022 demi menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi. Walaupun pengetatan moneter efektif mengendalikan inflasi dalam jangka pendek, terdapat potensi dampak negatif terhadap investasi domestik jangka panjang. Di sektor fiskal, pemerintah melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna mendukung aktivitas usaha dan menjaga daya beli masyarakat. Meskipun pemulihan ekonomi Indonesia menunjukkan perbaikan, tantangan masih hadir, seperti ketimpangan antar sektor, tekanan inflasi global, dan ketidakpastian geopolitik. Untuk mencapai pemulihan yang berkelanjutan, dibutuhkan perencanaan jangka panjang yang mencakup peningkatan investasi produktif serta reformasi struktural di bidang ketenagakerjaan dan industri.

Resiliensi Fiskal pada Masa Krisis Pandemi

Kemampuan suatu negara dalam menjaga stabilitas serta kesinambungan fiskal ketika menghadapi guncangan ekonomi besar, seperti pandemi COVID-19, dikenal sebagai resiliensi fiskal. Dalam konteks sistem ekonomi campuran, pemerintah memiliki ruang untuk meningkatkan peran intervensinya tanpa sepenuhnya mengabaikan mekanisme pasar. Pandemi menjadi ujian besar bagi ketahanan anggaran negara, efektivitas distribusi bantuan, serta integritas kebijakan fiskal dalam jangka panjang. Menurut International Monetary Fund (IMF), krisis ini telah menguji kredibilitas dan fleksibilitas aturan fiskal global, serta menegaskan pentingnya tata kelola fiskal yang adaptif dan transparan dalam situasi darurat

Indonesia menunjukkan ketangguhan fiskal yang adaptif dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dengan memberlakukan kebijakan luar biasa yang memperbolehkan defisit anggaran melampaui batas konstitusional sebesar 3% dari PDB. Ketentuan ini dituangkan dalam Perppu No. 1 Tahun 2020, yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk mengalokasikan dana pemulihan ekonomi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan total anggaran sebesar Rp695,2 triliun. Program tersebut mencakup lima sektor utama: perlindungan sosial, layanan kesehatan, insentif bagi pelaku usaha, dukungan terhadap UMKM, serta bantuan untuk perusahaan kecil dan menengah. Strategi ini mencerminkan keberanian fiskal pemerintah dalam menerapkan pendekatan counter-cyclical demi menstabilkan perekonomian nasional. Berdasarkan kajian empiris Rusdiyantoro

dan Simanjuntak (2021), yang menggunakan regresi OLS dan koefisien HAC ditemukan bahwa Indonesia mampu mempertahankan surplus primer dalam kondisi tertentu, serta menunjukkan respons fiskal yang konstruktif meski tekanan defisit meningkat. Hasil ini menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal Indonesia tetap rasional, dapat diandalkan, dan mampu menjaga kesinambungan fiskal. Selain itu, kebijakan tersebut mendukung daya beli masyarakat dan turut menstabilkan ekonomi dalam jangka pendek. Resiliensi fiskal Indonesia, dalam konteks ini, lahir dari kebijakan yang responsif, fleksibel, dan didukung koordinasi kelembagaan fiskal dan moneter yang solid.

Sebaliknya, India memilih pendekatan yang berorientasi pada reformasi struktural dan penguatan basis industri nasional. Pemerintah India meluncurkan *Atmanirbhar Bharat Abhiyan* sebagai program stimulus utama, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan darurat pandemi sekaligus mengarahkan agenda transformasi ekonomi jangka menengah dan panjang. Namun, studi oleh Justina Jose dan Priyanka Mishra (2020) menunjukkan bahwa sebagian besar stimulus tersebut disalurkan dalam bentuk dukungan kredit dan jaminan pinjaman, bukan bantuan langsung atau belanja pemerintah. Akibatnya, kelompok berpenghasilan rendah terutama pekerja di sektor informal yang jumlahnya melebihi 80% dari total tenaga kerja tidak secara langsung merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Pelaksanaan awal program juga menghadapi hambatan dalam sistem distribusi fiskal, birokrasi yang tersentralisasi dan kapasitas institusi yang belum merata. Ketergantungan pada akses perbankan dalam menyalurkan insentif juga menyulitkan pelaku usaha mikro dan kelompok rentan.

Oleh karena itu, respons fiskal Indonesia dan India mencerminkan dua pendekatan resiliensi fiskal yang berbeda namun saling melengkapi. Indonesia menitikberatkan pada intervensi langsung berbasis perlindungan sosial dan penguatan UMKM, sementara India menggunakan krisis sebagai momentum untuk mendorong transformasi struktural dan kemandirian industri. Walaupun India memiliki paket stimulus yang lebih besar secara agregat, keterbatasan penyaluran langsung ke masyarakat menjadi kendala utama pada tahap awal. Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan dalam pendataan penerima bantuan dan efektivitas realisasi anggaran daerah. Secara keseluruhan, kedua negara ini berhasil menunjukkan bentuk resiliensi fiskal sesuai dengan kapasitas dan kerangka ekonomi masing-masing. Indonesia lebih tanggap terhadap pemulihan jangka pendek, sementara India mengarah pada ketahanan ekonomi jangka panjang. Strategi ini menunjukkan bahwa dalam sistem ekonomi campuran, negara memiliki keleluasaan untuk mengarahkan kebijakan fiskal secara adaptif sesuai dengan konteks krisis yang dihadapi.

Pembahasan

Efektifitas Sistem Ekonomi Campuran dalam Merespons Krisis Global

Pandemi COVID-19 mengilustrasikan bagaimana sistem ekonomi multidimensional mampu merespons krisis yang bersifat kompleks. Untuk mencapai stabilitas jangka pendek sekaligus melakukan pembaruan struktural dalam jangka panjang, diperlukan sistem yang mampu menyeimbangkan dinamika pasar dengan intervensi aktif dari negara. Pengalaman Indonesia dan India menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan sistem ini sangat bergantung pada fleksibilitas kebijakan, kekuatan kelembagaan, serta kecepatan respons pemerintah.

Di Indonesia, respons krisis diwujudkan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berfokus pada perlindungan sosial dan dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sementara itu, India memanfaatkan situasi krisis sebagai titik tolak untuk mendorong reformasi struktural melalui inisiatif *Atmanirbhar Bharat Abhiyan*, dengan orientasi pada pembenahan jangka menengah di sektor industri. Kedua pendekatan ini mencerminkan karakter sistem ekonomi campuran, di mana negara berperan aktif namun tetap memberi ruang bagi mekanisme pasar untuk berfungsi secara optimal. Konsistensi Pelayanan melalui Standarisasi dan Disiplin

Di sisi moneter, kedua negara menunjukkan respons aktif bank sentral dalam menstabilkan pasar keuangan dan menyediakan likuiditas. Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan, mengurangi cadangan wajib minimum, dan membeli obligasi pemerintah secara langsung dari pasar primer, sebagai langkah untuk menjaga stabilitas moneter (Eckhold, 2024). Di India, Reserve Bank of India (RBI) mengambil langkah serupa dengan menurunkan suku bunga dan memberikan moratorium kredit yang membantu meringankan beban pelaku usaha selama masa pembatasan ekonomi.

Namun Efektivitasnya sistem ekonomi campuran juga bergantung pada seberapa baik kebijakan tersebut dilaksanakan. Di Indonesia, meskipun berbagai insentif sudah digulirkan dalam hal distribusi bantuan pemerintah karena kendala administratif atau keterbatasan informasi (Pangaribowo et al., 2022).

Dengan demikian, efektivitas sistem ekonomi campuran selama krisis global seperti pandemi

tergantung pada fleksibilitas kebijakan fiskal dan moneter, koordinasi antar instansi, serta kesiapan infrastruktur digital dan sosial. Meskipun belum sempurna, pendekatan ini mampu menjaga stabilitas ekonomi makro dan melindungi kelompok masyarakat rentan dari dampak krisis yang lebih dalam

Evaluasi Stabilitas Makroekonomi Pasca Pandemi

Dengan proyeksi pertumbuhan PDB antara 6,5 hingga 7,4 persen serta peningkatan kualitas sektor perbankan, India memberikan indikasi kuat akan pemulihan makroekonomi. Reserve Bank of India (RBI) secara aktif menetapkan kebijakan suku bunga dan strategi pengendalian inflasi. Meski demikian, tekanan eksternal seperti fluktuasi harga minyak dan volatilitas nilai tukar tetap menjadi tantangan signifikan. Paket kebijakan Atmanir Bharat juga berkontribusi terhadap perbaikan kapasitas produksi domestik dan kestabilan sektor informal. Namun tekanan inflasi akibat gangguan pasokan global dan fluktuasi tetap muncul, memaksa RBI untuk transisi ke kebijakan moneter yang lebih ketat pada akhir 2023 hingga 2024. Stabilitas ekonomi makro pasca pandemi memerlukan keseimbangan antara moneter ketat dan fiskal berkelanjutan, serta reformasi struktural untuk mendukung pertumbuhan jangka pendek.

Sementara itu, Indonesia mencatatkan pertumbuhan PDB sebesar 5,31 persen pada tahun 2022, yang terutama ditopang oleh peningkatan konsumsi domestik dan ekspor. Bank Indonesia berperan menstabilkan nilai tukar dan pasar keuangan melalui pelepasan kebijakan moneter akomodatif serta intervensi strategis di pasar obligasi dan cadangan devisa. Tingkat pengangguran mengalami penurunan, meskipun tanda-tanda pemulihan di sektor informal terlihat dari pergeseran komposisi tenaga kerja. Meskipun terdampak oleh kenaikan harga energi dan pelemahan nilai tukar rupiah, stabilitas harga secara umum tetap terjaga. World bank mencatat Indonesia mampu menarik investasi dan menciptakan iklim bisnis makro yang stabil, terbukti dari tingkat CDS (Credit Default Swap) dan EMBI (Emerging Markets Bond Index) yang rendah pasca pandemi.

Evaluasi stabilitas makroekonomi pasca pandemi menunjukkan bahwa pendekatan sistem ekonomi campuran yang mengombinasikan instrumen fiskal dan moneter yang sinergis berhasil menjaga stabilitas makro di Indonesia dan India. Keberhasilan jangka panjang keduanya sangat tergantung pada keberhasilan implementasi reformasi struktural, penguatan indeks kredibel dalam lembaga keuangan, serta penyesuaian kebijakan terhadap resiko global seperti volatilitas komoditas dan inflasi impor.

Resiliensi Fiskal: Kekuatan Adaptif Indonesia dan Transformasi Struktural India

Indonesia merespons tekanan fiskal secara cepat dan adaptif dengan membiarkan defisit anggaran melewati ambang batas 3% terhadap PDB. Indonesia memamerkan resiliensi fiskal yang kuat melalui kebijakan peyangga yang fleksibel dan adaptif. Menurut laporan IMF 2024, konsolidasi fiskal pasca pandemi dilakukan dengan disiplin, dimana defisit anggaran kembali turun dibawah ambang batas 3% PDB pada tahun 2022 dan bahkan terdapat surplus primer pada 2023 mencerminkan kemampuan fiskal yang memadai dalam merespons kondisi darurat tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Kebijakan desentralisasi fiskal turut memperkuat stabilitas regional, karena dana alokasi dan belanja modal memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi selama pandemi (Purnomo, 2023). Sementara India memanfaatkan krisis sebagai momentum untuk reformasi struktural jangka panjang, strategi counter-cyclical yang diterapkan juga mengandalkan peningkatan belanja sosial dan dukungan langsung bagi pelaku UMKM. Pendekatan ini terbukti mampu mengangkat konsumsi masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi dalam jangka pendek. Sebaliknya, kebijakan counter-cyclical yang menitikberatkan pada dukungan kredit dan skema penjaminan belum secara optimal menjangkau kelompok berpendapatan rendah. Namun demikian, India masih menghadapi sejumlah tantangan besar, seperti kompleksitas birokrasi, kesenjangan akses digital, serta minimnya jaminan sosial untuk sektor informal.

Kedua negara menunjukkan kekuatan adaptif yang khas dimana Indonesia berhasil kembali ke jalur fiskal sehat melalui surplus primer dan reformasi desentralisasi sedangkan India berupaya merestrukturisasi kerangka fiskal dengan orientasi pada reformasi struktural dan peningkatan produktivitas sektor domestik. Meskipun kedua negara menempuh jalur yang berbeda, keduanya berada dalam kerangka sistem ekonomi campuran yang menekankan keseimbangan antara peran pasar dan intervensi negara. Keberhasilan jangka panjang akan sangat bergantung pada keberlanjutan reformasi fiskal, peningkatan kapasitas penerimaan pajak, serta keseriusan dalam menerapkan kerangka fiskal *rule-based* yang adaptif.

Efektifitas Sistem Ekonomi Campuran: Refleksi Komparatif

Perbandingan antara kedua negara menunjukkan bahwa sistem ekonomi campuran pada dasarnya mampu

berfungsi secara efektif. Namun, keberhasilan implementasinya sangat ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, efisiensi birokrasi, dan kesiapan teknologi yang dimiliki. India menonjol dalam hal visi jangka panjang dan ketahanan sektor industrinya, sementara Indonesia menunjukkan keunggulan dalam menjaga stabilitas ekonomi serta daya beli masyarakat dalam jangka pendek.

Oleh karena itu, negara-negara dengan sistem ekonomi campuran perlu mengintegrasikan intervensi langsung yang adaptif dengan strategi pembangunan jangka panjang secara seimbang, agar mampu merespons dinamika global secara lebih tangguh.

Refleksi Komparatif atas respons Indonesia dan India menunjukkan bahwa efektivitas sistem ekonomi campuran terletak pada kemampuannya menciptakan sinergi antara pasar dan negara dalam kondisi darurat. Kunci keberhasilan tidak hanya terletak pada besarnya stimulus, tetapi juga pada ketepatan sasaran, koordinasi lintas sektor dan kecepatan pelaksanaan kebijakan. Indonesia unggul dalam respons koordinatif fiskal-moneter yang relatif efisien, sementara India menonjol dalam skala reformasi struktural dan intervensi terhadap sektor domestik. Dengan demikian, pendekatan sistem ekonomi campuran memberikan fleksibilitas yang adaptif, namun tetap membutuhkan kapasitas institusional yang kuat untuk memastikan bahwa intervensi negara dapat berjalan secara efektif dan merata di tengah kondisi krisis (Sachdeva, 2024).

SIMPULAN

Penelitian ini membandingkan pendekatan Indonesia dan India dalam mengelola krisis multidimensi akibat pandemi COVID-19 guna menilai efektivitas sistem ekonomi campuran. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem ini memberikan fleksibilitas bagi negara dalam menggabungkan mekanisme pasar dengan intervensi kebijakan secara adaptif dan kontekstual. Indonesia menonjol melalui strategi jangka pendek yang berfokus pada perlindungan sosial, dukungan terhadap UMKM, dan koordinasi fiskal-moneter yang responsif, yang secara signifikan berkontribusi pada stabilitas konsumsi domestik serta percepatan pemulihan ekonomi. Kendati demikian, Indonesia masih menghadapi kendala dalam distribusi bantuan dan ketimpangan sektor informal. Di sisi lain, India menerapkan pendekatan jangka panjang melalui program Atmanirbar Bharat, yang menitikberatkan pada reformasi struktural dan peningkatan kapasitas industri nasional. Meskipun strategi ini berpotensi menciptakan transformasi ekonomi yang berkelanjutan, hambatan birokrasi dan keterbatasan akses bagi kelompok rentan masih menjadi tantangan utama. Kedua negara mencerminkan ciri khas sistem ekonomi campuran yang adaptif dengan mengedepankan sinergi kebijakan fiskal dan moneter, penguatan kelembagaan serta dukungan infrastruktur dan teknologi. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi sistem sangat dipengaruhi oleh kecepatan respons kebijakan dan kemampuan negara dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara inklusif. Kesimpulannya, sistem ekonomi campuran dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional, baik melalui respons cepat seperti Indonesia maupun reformasi struktural jangka panjang seperti di India, asalkan diterapkan secara konsisten dan responsif terhadap kondisi krisis. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan ekonomi publik yang inklusif dan tangguh dalam menghadapi krisis global mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Baber, H., Shaik, M., & Gupta, H. (2024). An Analysis of the Indian Economy During the Three Covid-19 Pandemic Waves. *Technological and Economic Development of Economy*, 31(1), 169–183. <https://doi.org/10.3846/tede.2024.21872>
- Eckhold, K. (2024). EMDE Central Bank Interventions during COVID-19 to Support Market Functioning. *IMF Working Papers*, 2024(101), 1. <https://doi.org/10.5089/9798400275845.001>
- Kalamen, K., Pollák, F., & Markovič, P. (2023). Pandemic Economic Crises. *Encyclopedia*, 3(4), 1489–1497. <https://doi.org/10.3390/encyclopedia3040106>
- Marginingsih, R. (2021). Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai Kebijakan Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor UMKM. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 110–116. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i2.10997>
- Pangaribowo, D., Rosalia, F., Mukhlis, M., Novriansyah, M. F., & Poniasih, N. K. (2022). The Effectiveness of the Indonesian Government's Economic Stimulus Policy during the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Public Policy*, 8(1), 36. <https://doi.org/10.35308/jpp.v8i1.4048>
- Purnomo, M. E. (2023). Analysis of the Impact of Fiscal Decentralization Policies on Indonesia's Economic Growth During the Covid-19 Pandemic. *Journal of International Conference Proceedings*, 6(1).
- Sachdeva, P. (2024). Fiscal and monetary policy regimes: New evidence from India. *Economic Modelling*,

139.

- Shandilya, S. (2024). the Impact of the Covid-19 Pandemic on the Indian Economy: Challenges, Disruptions, and Pathways To Recovery. *International Journal of Advanced Research*, 12(04), 496–501. <https://doi.org/10.21474/ijar01/18574>
- Sukamdi, Pujiwati, L. A., Alabshar, N., Widaryoko, N., Munawaroh, T., & Setiawan, E. P. (2024). COVID-19 Pandemic: Its Impacts on Economic Growth, Unemployment, and Poverty in Indian. *Southeast Asian Journal of Economics*, 12(3), 1–36.
- Alloy, U. (2020). Effect of Ultrasonic Surface Rolling Treatment on Corrosion Behavior of Alloy 690. *Jurnal Teknik*.
- Caselli, D. d. (2022). Pandemic Tests Resilience and Credibility of Fiscal Rules. *IMF Working Paper*.
- Gupta, I. (2023). *India's Lopsided Post-COVID Economic Recovery*. From thediplomat.com .
- India rate panel hopes to boost consumption, investment with large rate cut, minutes show*. (2025). From Reuters.
- Maharani, Y. (2022, Maret). Strategi Kebijakan Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Indonesia). *JEMASI (Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 17(2), 234-244.
- RI, D. (2021). Artikel Jurna DPR. *Jurnal DPR RI*.